

**PENGARUH PEMAHAMAN DAN KESADARAN WAJIB PAJAK
TERHADAP KEPATUHAN WAJIB PAJAK**
(Studi Kasus pada Komite Pengusaha Alas Kaki Kota Mojokerto)

SKRIPSI



Diajukan oleh:

KURNIA WIDHI HAPSARI
0613010212 / FE / EA

**FAKULTAS EKONOMI
UNIVERSITAS PEMBANGUNAN NASIONAL “VETERAN”
JAWA TIMUR
2010**

**PENGARUH PEMAHAMAN DAN KESADARAN WAJIB PAJAK
TERHADAP KEPATUHAN WAJIB PAJAK
(Studi Kasus pada Komite Pengusaha Alas Kaki Kota Mojokerto)**

SKRIPSI

Diajukan untuk Memenuhi Sebagian Persyaratan
Dalam Memperoleh Gelar Sarjana Ekonomi
Jurusan Akuntansi



Diajukan Oleh:

KURNIA WIDHI HAPSARI
0613010212 / FE / EA

**FAKULTAS EKONOMI
UNIVERSITAS PEMBANGUNAN NASIONAL "VETERAN"
JAWA TIMUR
2010**

**PENGARUH PEMAHAMAN DAN KESADARAN WAJIB PAJAK
TERHADAP KEPATUHAN WAJIB PAJAK
(Studi Kasus Pada Komite Pengusaha Alas Kaki Kota Mojokerto)**

Di susun Oleh :

**Kurnia Widhi Hapsari
0613010212/FE/EA**

**Telah dipertahankan dihadapan dan diterima oleh
Tim Penguji Skripsi Jurusan Akuntansi Fakultas Ekonomi
Universitas Pembangunan Nasional “ Veteran “ Jawa Timur
Pada Tanggal 30 April 2010**

**Pembimbing :
Pembimbing Utama :**

**Tim Penguji :
Ketua**

**Rina Mustika, SE, MMA
MM**

Drs.Ec.H.Tamadoy Thamrin,

Sekretaris

Dra. Ec. Endah Susilowati, M.Si

Anggota

Rina Mustika, SE, MMA

**Mengetahui
Dekan Fakultas Ekonomi
Universitas Pembangunan Nasional “ Veteran “
Jawa Timur**

**Dr. Dhani Ichsanudin Nur, MM,
NIP. 030 202 389**

USULAN PENELITIAN
PENGARUH PEMAHAMAN DAN KESADARAN WAJIB PAJAK
TERHADAP KEPATUHAN WAJIB PAJAK
(Studi Kasus pada Komite Pengusaha Alas Kaki Kota Mojokerto)

Yang diajukan
KURNIA WIDHI HAPSARI
0613010212 / FE / EA

Telah disetujui untuk diseminarkan oleh

Pembimbing Utama

Rina Mustika, SE, MMA
NIP. 95 690 0048

Tanggal :

Mengetahui
Ketua Prodi Akuntansi

Dr. Sri Trisnaningsih, MSi
NIP. 030 217 167

SKRIPSI
PENGARUH PEMAHAMAN DAN KESADARAN WAJIB PAJAK
TERHADAP KEPATUHAN WAJIB PAJAK
(Studi Kasus pada Komite Pengusaha Alas Kaki Kota Mojokerto)

Yang diajukan
KURNIA WIDHI HAPSARI
0613010212 / FE / EA

Disetujui untuk ujian lisan oleh

Pembimbing Utama

Rina Mustika, SE, MMA
NIP. 95 690 0048

Tanggal :

Mengetahui
Wakil Dekan Fakultas Ekonomi

Drs. Ec. Saiful Anwar, MSi
NIP. 030 194 437

KATA PENGANTAR

Dengan memanjatkan puji syukur kehadiran Tuhan Yang Maha Esa atas segala berkat dan rahmatnya yang dilimpahkan, sehingga penulis dapat menyelesaikan penulisan skripsi yang berjudul **“PENGARUH PEMAHAMAN DAN KESADARAN WAJIB PAJAK TERHADAP KEPATUHAN WAJIB PAJAK”** (Studi Kasus Pada Komite Pengusaha Alas Kaki Kota Mojokerto).

Penulisan skripsi ini disusun sebagai salah satu syarat untuk dapat memperoleh gelar Sarjana Ekonomi pada jurusan ekonomi akuntansi, di Universitas Pembangunan Nasional “Veteran” Jawa Timur.

Dengan selesainya skripsi ini, penulis sangat berterima kasih atas segala bantuan dan fasilitas dari berbagai pihak yang diberikan kepada penulis guna mendukung penyelesaian skripsi ini. Maka, pada kesempatan ini penulis mengucapkan terima kasih yang sebesar-besarnya kepada yang terhormat :

1. Bapak Prof. Dr. Ir. H. R. Teguh Soedarto, MP selaku Rektor Universitas Pembangunan Nasional “Veteran” Jawa Timur.
2. Bapak Dr. Dhani Ichsanudin, MM selaku Dekan Fakultas Ekonomi Universitas Pembangunan Nasional “Veteran” Jawa Timur.
3. Ibu Dr. Sri Trisnaningsih, MSi selaku Ketua Program Studi Akuntansi Fakultas Ekonomi Universitas Pembangunan Nasional “Veteran” Jawa Timur.
4. Ibu Rina Mustika, SE, MMA selaku Dosen Pembimbing yang dengan sabar telah meluangkan waktu dan tenaganya dalam memberi bimbingan,

terima kasih atas semua saran, motivasi, dan bimbingannya selama menyusun skripsi ini.

5. Segenap tenaga pengajar, staf, dan karyawan Fakultas Ekonomi Universitas Pembangunan Nasional “Veteran” Jawa Timur.
6. KPP Pratama Mojokerto serta Pak Amru dan Mas Choiron di KOMPAK, terima kasih atas bimbingan dan data – data yang dibutuhkan dalam penyusunan skripsi.
7. Bapak dan Ibu tercinta terima kasih atas kasih sayang, kesabaran, semangat dan dukungan moril maupun materiil dengan tulus ikhlas tanpa pamrih.

Penulis juga mengucapkan terima kasih kepada semua pihak yang tidak dapat disebutkan satu – persatu. Skripsi ini tidak lepas dari kekurangan, maka penulis mengharapkan saran dan kritik yang membangun bagi kesempurnaan.

Surabaya, 20 April 2010

Penulis

DAFTAR ISI

KATA PENGANTAR.....	i
DAFTAR ISI.....	iii
DAFTAR TABEL.....	viii
DAFTAR GAMBAR.....	ix
DAFTAR LAMPIRAN.....	x
ABSTRAKSI.....	xi
BAB I PENDAHULUAN.....	1
1.1. Latar Belakang Masalah.....	1
1.2. Perumusan Masalah.....	7
1.3. Tujuan Penelitian.....	7
1.4. Manfaat Penelitian.....	7
BAB II TINJAUAN PUSTAKA.....	9
2.1. Penelitian Terdahulu.....	9
2.2. Landasan Teori.....	14
2.2.1. Pengertian Pajak.....	14
2.2.2. Fungsi – fungsi Pajak.....	15
2.2.3. Syarat – syarat Pemungutan Pajak.....	16
2.2.4. Teori yang Mendukung Pemungutan Pajak.....	17
2.2.5. Pengelompokan atau Pembagian Pajak.....	19
2.2.6. Sistem Pemungutan Pajak.....	21

2.2.7. Penetapan Tarif Pajak.....	22
2.2.8. Pengertian Pajak Penghasilan.....	23
2.2.8.1. Subjek Pajak.....	23
2.2.8.2. Objek Pajak.....	25
2.2.8.3. Dasar Pembukuan dan Pencatatan.....	26
2.2.8.4. Dasar Pembukuan Penghasilan Kena Pajak (PKP).....	27
2.2.8.5. Penghasilan Tidak Kena Pajak.....	27
2.2.8.6. Tarif Pajak.....	28
2.2.9. Kepatuhan Wajib Pajak.....	29
2.2.10. Pemahaman Wajib Pajak.....	31
2.2.10.1. Pengaruh Pemahaman Wajib Pajak terhadap Kepatuhan Wajib Pajak.....	32
2.2.11. Kesadaran Wajib Pajak.....	33
2.2.11.1. Pengaruh Kesadaran Wajib Pajak terhadap Kepatuhan Wajib Pajak.....	34
2.3. Kerangka Pikir	36
2.4. Hipotesis	37
BAB III METODE PENELITIAN.....	38
3.1. Definisi Operasional dan Pengukuran Variabel.....	38
3.1.1. Definisi Operasional Variabel.....	38
3.1.2. Pengukuran Variabel.....	39

3.2. Teknik Penentuan Sampel.....	41
3.2.1. Populasi.....	41
3.2.2. Sampel.....	41
3.3. Teknik Pengumpulan Data.....	42
3.3.1. Jenis Data.....	42
3.3.2. Teknik Pelaksanaan.....	42
3.4. Uji Kualitas Data.....	43
3.4.1. Uji Validitas.....	43
3.4.2. Uji Reliabilitas.....	44
3.4.3. Uji Normalitas.....	45
3.5. Uji Asumsi Klasik.....	45
3.5.1. Multikolinearitas.....	46
3.5.2. Autokorelasi.....	47
3.5.3. Heteroskedastisitas.....	47
3.6. Teknik Analisis dan Uji Hipotesis.....	48
3.6.1. Teknik Analisis.....	48
3.6.2. Uji Hipotesis.....	49
3.6.2.1. Uji F (Uji Kecocokan Model).....	49
3.6.2.2. Uji t (Uji Pengaruh X_1 dan X_2 terhadap Y)....	50

BAB IV HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN..... 51

4.1. Deskripsi Objek Penelitian.....	51
4.1.1. Sejarah Kota Mojokerto.....	51

4.1.2. Komite Pengusaha Alas Kaki Kota Mojokerto.....	52
4.1.3. Struktur Kepengurusan Komite Pengusaha Alas Kaki Kota Mojokerto.....	53
4.2. Deskripsi Hasil Penelitian.....	53
4.2.1. Deskripsi Hasil Penelitian Variabel Pemahaman Wajib Pajak (X_1).....	54
4.2.2. Deskripsi Hasil Penelitian Variabel Kesadaran Wajib Pajak (X_2).....	56
4.2.3. Deskripsi Hasil Penelitian Variabel Kepatuhan Wajib Pajak (Y).....	57
4.3. Uji Kualitas Data.....	59
4.3.1. Uji Validitas.....	59
4.3.2. Uji Reliabilitas.....	63
4.3.3. Uji Normalitas.....	64
4.4. Uji Asumsi Klasik.....	65
4.4.1. Uji Multikolinieritas.....	65
4.4.2. Uji Autokorelasi.....	66
4.4.3. Uji Heteroskedastisitas.....	67
4.5. Teknik Analisis dan Pengujian Hipotesis.....	68
4.5.1. Analisis Hipotesis.....	68
4.5.2. Koefisien Determinasi.....	70
4.5.3. Uji Hipotesis.....	71
4.5.3.1. Uji F (Uji Kecocokan Model).....	71

4.5.3.2. Uji t (Uji Pengaruh X_1 dan X_2 terhadap Y).....	72
4.6. Pembahasan Hasil Penelitian.....	73
4.7. Perbedaan Hasil Penelitian Sekarang Dengan Penelitian Terdahulu.....	76
4.8. Keterbatasan Penelitian.....	80
BAB V KESIMPULAN DAN SARAN.....	82
5.1. Kesimpulan.....	82
5.2. Saran.....	82

DAFTAR PUSTAKA

LAMPIRAN

DAFTAR TABEL

Tabel:

1.1. : Kepatuhan Pelaporan SPT PPh OP Usahawan KPP Pratama Mojokerto.....	6
4.1. : Deskripsi Jawaban Responden mengenai Variabel Pemahaman Wajib Pajak (X_1).....	54
4.2. : Deskripsi Jawaban Responden mengenai Variabel Kesadaran Wajib Pajak (X_2).....	56
4.3. : Deskripsi Jawaban Responden mengenai Variabel Kepatuhan Wajib Pajak (Y)	58
4.4. : Hasil Uji Validitas Variabel Pemahaman Wajib Pajak (X_1).....	60
4.5. : Hasil Uji Validitas Variabel Kesadaran Wajib Pajak (X_2).....	60
4.6 . : Hasil Uji Validitas Variabel Kepatuhan Wajib Pajak (Y) – Iterasi Pertama.....	61
4.7. : Hasil Uji Validitas Variabel Kepatuhan Wajib Pajak (Y) – Iterasi Kedua.....	62
4.8. : Hasil Uji Validitas Variabel Kepatuhan Wajib Pajak (Y) – Iterasi Ketiga.....	62
4.9. : Hasil Uji Reliabilitas Masing – masing Variabel.....	63
4.10. : Hasil Uji Normalitas.....	64
4.11. : Hasil Uji Multikolinieritas.....	66
4.12. : Hasil Uji Heteroskedastisitas.....	67
4.13. : Hasil Estimasi Koefisien Regresi.....	68
4.14. : Nilai Koefisien Determinasi	70
4.15. : Hasil Uji F (Uji Kecocokan Model).....	71
4.16. : Hasil Uji t antara Variabel Bebas terhadap Variabel Terikat.....	72

DAFTAR GAMBAR

Gambar 2.1. : Kerangka Pikir.....	37
-----------------------------------	----

DAFTAR LAMPIRAN

- Lampiran 1 : Daftar Nama Anggota Komite Pengusaha Alas Kaki
(KOMPAK) Kota Mojokerto
- Lampiran 2 : Kuesioner
- Lampiran 3 : Rekapitulasi Jawaban Responden
- Lampiran 4 : Tabulasi Data
- Lampiran 5 : Uji Validitas
- Lampiran 6 : Uji Reliabilitas
- Lampiran 7 : Uji Normalitas
- Lampiran 8 : Uji Asumsi Klasik
- Lampiran 9 : Uji Hipotesis

**PENGARUH PEMAHAMAN DAN KESADARAN WAJIB PAJAK
TERHADAP KEPATUHAN WAJIB PAJAK
(Studi Kasus pada Komite Pengusaha Alas Kaki Kota Mojokerto)**

Kurnia Widhi Hapsari

Abstraksi

Pajak didasarkan pada Undang - Undang yang berarti bahwa pemungutan pajak tersebut sudah disepakati atau disetujui bersama antara pemerintah dengan masyarakat. Harapan pemerintah terhadap semua wajib pajak mengenai pembayaran tanpa adanya kecurangan. Maka sudah seharusnya masyarakat sadar akan kewajibannya untuk membayar pajak. Masyarakat harus membayar pajak dengan benar sesuai dengan peraturan perundang - undangan yang berlaku. Namun kenyataannya banyak hambatan yang dihadapi dalam pelaksanaan pemungutan pajak, wajib pajak tersebut tidak menguasai benar tentang Undang-Undang perpajakan sehingga Ditjen Pajak menanggapi hal tersebut sebagai ketidakpatuhan dan memberi pemahaman dan kesadaran kepada masyarakat untuk memperoleh kepatuhan akan kewajibannya sebagai wajib pajak.

Penelitian ini dilakukan dengan menggunakan kuesioner. Pengukuran variabelnya menggunakan skala Likert dengan skala data yang digunakan berupa skala interval. Sedangkan alat ukur yang dipakai untuk mengukur variabel ini menggunakan strategi survey dengan model impersonal. Teknis analisis yang digunakan dalam penelitian ini adalah regresi linier berganda dengan uji hipotesisnya berupa uji F dan uji t. untuk mengolah data yang diperoleh digunakan SPSS.

Berdasarkan hasil penelitian yang telah dilakukan dapat diambil kesimpulan bahwa hipotesis yang menyatakan diduga pemahaman dan kesadaran wajib pajak berpengaruh terhadap kepatuhan wajib pajak studi kasus pada komite pengusaha alas kaki Kota Mojokerto, tidak terbukti kebenarannya.

Keywords: pemahaman wajib pajak , kesadaran wajib pajak, kepatuhan wajib pajak

BAB I

PENDAHULUAN

1.1. Latar Belakang

Pembangunan ekonomi diarahkan pada upaya untuk mewujudkan perekonomian negara yang mandiri dan andal untuk meningkatkan kesejahteraan seluruh wilayah negara Indonesia secara adil dan merata, dengan demikian pertumbuhan ekonomi harus diarahkan untuk meningkatkan pendapatan bangsa Indonesia, dimana sedang mengalami krisis ekonomi sedangkan roda pemerintahan dan pembangunan tidak mungkin dapat digerakkan tanpa dukungan dana terutama berasal dari pendapatan dalam negeri. Oleh karena itu pemerintah berusaha terus – menerus meningkatkan peranan sumber penerimaan negara, terutama penerimaan yang berasal dari non migas. Penerimaan dari non migas ini sebagian akan ditingkatkan melalui penerimaan dari sektor pajak. Misi utama Direktorat Jendral Pajak adalah misi fiskal yaitu menghimpun penerimaan pajak berdasarkan Undang – Undang Perpajakan yang mampu menunjang kemandirian pembiayaan pemerintah dan dilaksanakan secara efektif dan efisien (Suryadi, 2006: 106).

Pajak merupakan sarana yang digunakan pemerintah untuk memperoleh dana dari rakyat. Hasil penerimaan pajak tersebut untuk mengisi anggaran negara sekaligus membiayai keperluan belanja negara (belanja rutin dan belanja pembangunan). Untuk itu, negara memerlukan

dana yang cukup besar guna membiayai kegiatan pembangunan yang berlangsung terus – menerus dan berkesinambungan. Pajak dibedakan menjadi dua fungsi yaitu fungsi *budgetair* (sumber penerimaan negara) dan fungsi *regulerend* (mengatur). Fungsi *budgetair* artinya pajak merupakan salah satu sumber penerimaan pemerintah untuk membiayai pengeluaran baik rutin maupun pembangunan. Sedangkan fungsi *regulerend* artinya pajak sebagai alat untuk mengatur atau melaksanakan kebijakan pemerintah dalam bidang sosial dan ekonomi serta mencapai tujuan – tujuan tertentu di luar bidang keuangan. Dari fungsi ini pada dasarnya pemerintah ingin kembali menegaskan peranan penting pajak baik sebagai alat penerimaan negara seperti yang telah dijelaskan sebelumnya, maupun sebagai alat untuk melaksanakan berbagai kebijakan di bidang sosial ekonomi (Resmi, 2008: 3).

Dalam rangka upaya peningkatan penerimaan pajak, pemerintah melakukan perubahan mendasar dengan dikeluarkannya UU Nomor 6 Tahun 1983 tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan merubah sistem pemungutan pajak yang digunakan di Indonesia yaitu digunakannya *self assessment system* yang menggantikan *official assessment system*. Kedua sistem ini memiliki perbedaan dalam mekanisme dan sudut pandang terhadap wajib pajak.

Pada *official assessment system*, petugas pajak berkewajiban menetapkan berapa besar sesungguhnya pajak yang terutang oleh wajib pajak, sedangkan pada *self assessment system*, wajib pajak berkewajiban,

menghitung, memperhitungkan, membayar dan melaporkan sendiri jumlah pajak yang terutang. Walaupun berbeda, kedua sistem penetapan pajak tersebut dalam praktiknya tetap memerlukan pengawasan dari pihak pemerintah dalam bentuk pemeriksaan untuk menguji kepatuhan wajib pajak dalam melaksanakan kewajiban perpajakannya (Sofyan, 2003: 30).

Sistem *self assessment* memberikan kepercayaan penuh kepada wajib pajak untuk menghitung, memperhitungkan, menyetor, dan melaporkan seluruh pajak yang menjadi kewajibannya. Dengan kata lain, wajib pajak menentukan sendiri besarnya pajak yang terutang (Supadmi, 2006).

Hal ini dapat digunakan untuk mengukur perilaku wajib pajak, yaitu seberapa besar tingkat kepatuhan wajib pajak dalam melaksanakan kewajiban mengisi dan menyampaikan Surat Pemberitahuan (SPT) secara benar dan tepat, semakin tinggi tingkat kebenaran dalam menghitung, ketepatan menyetor serta menyampaikan Surat Pemberitahuan (SPT) secara benar dan tepat, maka diharapkan semakin tinggi pula tingkat kepatuhan wajib pajak dalam melaksanakan dan memenuhi kewajibannya.

Dalam rangka untuk pengisian Surat Pemberitahuan (SPT) Tahunan Pajak Penghasilan (PPh) Wajib Pajak disamping menyelenggarakan pembukuan, harus pula melengkapi dengan laporan keuangan yang berupa neraca, dan perhitungan laba – rugi serta keterangan lain yang diperlukan untuk menghitung besarnya penghasilan kena pajak. Hal tersebut sesuai dengan ketentuan dalam Undang – Undang

No.6 Tahun 1983 tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan pasal 4 ayat 4 yang berbunyi sebagai berikut :

Pembukuan yang tertib dan benar dapat menghasilkan laporan keuangan yang andal dan memadai untuk mendukung perhitungan besarnya Penghasilan Kena Pajak (PKP), sehingga Wajib Pajak dapat mengisi serta menyampaikan Surat Pemberitahuan (SPT) dengan benar dan tepat waktu.

Mengingat betapa pentingnya peran masyarakat untuk membayar pajak dalam peran sertanya menanggung pembiayaan negara, dituntut kesadaran warga negara untuk memenuhi kewajiban kenegaraannya. Terlepas dari kesadaran sebagai warga negara, sebagian besar masyarakat tidak memenuhi kewajiban membayar pajak. Dalam hal demikian timbul perlawanan terhadap pajak. Perlawanan terhadap pajak dapat dibedakan menjadi perlawanan pasif dan perlawanan aktif (Waluyo & Ilyas, 2002: 11).

Penerimaan perpajakan Indonesia dari Pajak Penghasilan (PPh) orang pribadi pada 2008 hanya 22,89%, sedangkan penerimaan dari PPh badan terhadap realisasi penerimaan PPh nonmigas mencapai 77,11 %. Di negara maju, penerimaan PPh orang pribadi justru lebih besar ketimbang badan. Atas realisasi itu, pemerintah mengajukan Rancangan Undang - Undang (RUU) tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang - Undang (Perppu) Nomor 6 Tahun 1983 tentang Ketentuan

Umum dan Tata Cara Perpajakan (KUP) menjadi UV (Daily Indonesia, 2009).

Dengan adanya perpanjangan *sunset policy* masyarakat diharapkan semakin banyak dan lebih terbuka mengungkapkan data perpajakannya. “Peranan penerimaan PPh orang pribadi di negara maju lebih besar, sejalan dengan kesadaran akan kewajiban warga negara bahwa pembayaran pajak merupakan kewajiban konstitusional dan sejalan dengan cita – cita demokrasi bangsa,” kata Menteri Keuangan (MenKeu) Sri Mulyani Indrawati pada raker dengan komisi XI di Jakarta. Dia menjelaskan, tingkat kepatuhan sukarela Wajib Pajak orang pribadi di Indonesia masih tergolong kurang antara lain karena lemahnya mekanisme *check and balances* terkait *sistem self assessment* dalam pemungutan pajak (Daily Indonesia, 2009).

Untuk meningkatkan penerimaan pajak perlu juga dilakukan penyempurnaan aparatur perpajakan serta mempersiapkan para Wajib Pajak yang telah diberi kebebasan dan kepercayaan yang besar dalam menghitung dan membayar sendiri pajaknya. Oleh sebab itu usaha pemerintah dalam mengoptimalkan penerimaan negara dari sektor pajak ini harus dimulai mewujudkannya. Berdasarkan data yang diperoleh dari KPP Pratama Mojokerto Penerimaan Pajak Penghasilan Orang Pribadi Usahawan Kota Mojokerto tahun 2008 sebesar Rp 2.799.306.407,00 -, dan pada tahun 2009 sebesar Rp 2.407.228.366,00 -, mengenai kepatuhan

terhadap penyampaian SPT, dapat diketahui dalam penyampaian SPT tahun 2008 dan tahun 2009 sebagai berikut :

Tabel 1.1

**Kepatuhan Pelaporan SPT PPh OP Usahawan KPP Pratama Mojokerto
Kota Mojokerto**

Tahun	Jumlah NPWP	SPT yang Dilaporkan	Prosentase
2008	9883	3548	35,9 %
2009	16223	4658	28,7 %

Sumber : KPP Pratama Kota Mojokerto Seksi PDI

Berdasarkan tabel 1.1 dapat dijelaskan bahwa pada tahun 2008 jumlah Wajib Pajak Orang Pribadi Usahawan yang terdaftar di KPP Pratama Mojokerto, Kota Mojokerto sebanyak 9883 Wajib Pajak, namun jumlah Wajib Pajak Orang Pribadi Usahawan yang lapor sebanyak 3548 Wajib Pajak dengan prosentase sebesar 35,9 % dari jumlah keseluruhan, sedangkan pada tahun 2009 jumlah Wajib Pajak Orang Pribadi Usahawan yang terdaftar semakin meningkat yaitu menjadi 16223 Wajib Pajak, namun jumlah Wajib Pajak Orang Pribadi Usahawan yang lapor sebanyak 4658 Wajib Pajak dengan prosentase sebesar 28,7 %. Dari kondisi ini berarti masih banyak wajib pajak yang belum memenuhi kewajiban perpajakannya.

Berdasarkan fenomena diatas, khususnya mengenai pajak, peneliti ingin mencoba meneliti dengan mengambil judul penelitian “ **Pengaruh**

**Pemahaman dan Kesadaran Wajib Pajak Terhadap Kepatuhan
Wajib Pajak (Studi Kasus Pada Komite Pengusaha Alas Kaki di Kota
Mojokerto ”.**

1.2. Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang, maka rumusan masalah dalam penelitian ini adalah :

“ Apakah Pemahaman dan Kesadaran Wajib Pajak Berpengaruh Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak (Studi Kasus Pada Komite Pengusaha Alas Kaki di Kota Mojokerto) ? “

1.3. Tujuan Penelitian

Untuk menguji secara empiris Pengaruh Pemahaman dan Kesadaran Wajib Pajak Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak (Studi Kasus Komite Pengusaha Alas Kaki di Kota Mojokerto).

1.4. Manfaat Penelitian

Adapun manfaat penelitian ini adalah sebagai berikut :

1. Bagi Pengrajin

Memberikan dasar yang kuat bahwa pemahaman dan kesadaran wajib pajak sangat diperlukan untuk meningkatkan kepatuhan wajib pajak.

2. Bagi Universitas

Menambah referensi sebagai perbandingan yang akan datang serta sebagai tambahan perpustakaan yang sudah ada.

3. Bagi Peneliti

Menambah pengetahuan peneliti dan mengembangkan ilmu yang telah diperoleh, khususnya bidang perpajakan.

4. Bagi Direktorat Jendral Pajak

Memberikan masukan kepada Direktorat Jendral Pajak terhadap pemahaman dan kesadaran wajib pajak dalam memenuhi kewajiban perpajakannya. Sehingga temuan ini nantinya diharapkan dapat digunakan sebagai pertimbangan untuk mengetahui tingkat kepatuhan sebelum dilakukan pemeriksaan pajak lebih lanjut.